



Kebijakan Harga Dalam Ekonomi Islam (2)

Catatan Mustafa Kamal Rokan

PADA 15 Juni 2015 lalu, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpangan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Perpres tersebut bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan stabilisasi harga barang yang beredar di pasar sehingga gejolak harga barang bisa diatasi dengan segera. Selain itu, Perpres melarang penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting di gudang ketika terjadi kelangkaan barang, gejolak harga atau ketika terjadi hambatan lalu lintas perdagangan barang.

Persoalan penetapan harga adalah salah satu diskursus ekonomi yang sangat penting sekaligus menentukan, mengingat harga adalah unsur penting dalam kegiatan ekonomi selain barang dan pelaku pasar. Oleh karena itu, tingginya dan ketetapan harga adalah sangat menentukan pasar dan ekonomi secara umum. Lalu, bagaimana konsep harga yang ideal atau adil? Dan efektifkah pengaturan harga yang dikeluarkan oleh Presiden tersebut?

Harga Yang Adil

Terminologi harga dalam ekonomi Islam disebut dengan kata *si'r al-misl*, *dlaman al-misl* atau juga *qimah*. Sedangkan harga yang adil disebut dengan *qimah al-'adl*. Istilah tersebut digunakan Nabi Muhammad Saw. saat mengomentari kompromi pembebasan budak, dimana sang majikan mendapatkan harga yang adil. Istilah *qimah al-'adl* juga pernah digunakan oleh Umar bin Khattab saat menetapkan nilai baru atas diat (uang tebusan) saat dirham turun sehingga harga-harga naik. Selanjutnya, istilah *qimah al-'adl* dan *dlaman al-misl* juga digunakan dalam kodifikasi hukum Islam tentang transaksi bisnis dengan objek barang cacat yang dijual, perebutan kekuasaan, memaksa penimbunan barang untuk menjual timbunannya, membuang jaminan harta milik dan sebagainya.

Dalam perspektif ekonomi Islam, harga yang adil paling tidak berdasarkan tiga (3) syarat. Pertama, harga yang diperoleh adalah berdasarkan mekanisme pasar dengan hukum permintaan (*supply*) dan penawaran (*demand*). Ibn Taimiyah menilai esensi keadilan (*nafs al-'adl*) dalam harga adalah kompensasi yang setara dan diukur oleh hal-hal yang setara atau harga yang setara adalah harga yang adil. Ibn Taimiyah juga mendefinisikan harga yang adil sebagai harga yang baku (*si'r*) dimana penduduk menjual barang dan menerima kompensasi yang setara pada barang yang sama, pada waktu dan tempat khusus.

Kedua, harga yang adil adalah harga yang diperoleh dengan transaksi perdagangan yang adil, bukan dengan cara penipuan atau penzoliman. Ibn Taimiyah mengatakan, "jika penduduk menjual barangnya dengan cara normal (*al-wajh al-mar'uf*), bukan cara-cara yang zolim (*udak adl*), namun harga itu meningkat (*irafa' al-sa'r*) karena pengaruh dari kurangnya persediaan barang atau disebabkan meningkatnya jumlah penduduk (berarti meningkatnya

Persoalan penetapan harga adalah salah satu diskursus ekonomi yang sangat penting sekaligus menentukan, mengingat harga adalah unsur penting dalam kegiatan ekonomi selain barang dan pelaku

permintaan, *demand*) itu semua karena Allah. Dalam hal ini, pemaksaan terhadap penjual untuk menjual barangnya pada harga khusus merupakan paksaan yang salah (*ikrah bi ghairi haqqin*).

Ketiga, harga yang adil adalah harga yang memper-
timbang kondisi sosial.

Harga yang adil tidak hanya berkaitan dengan harga yang dihasilkan mekanisme pasar tetapi juga berdasarkan kesejahteraan sosial pelaku usaha di sekitar. Harga pasar yang adil sebagaimana diungkapkan Ajaz Ahmad Khan tidak hanya berdasarkan ongkos produksi (*cost of production*) tetapi juga berdasarkan keadilan sosial dan lingkungan, bahkan keadilan pasar bertujuan untuk menyeimbangkan antara orang kaya dan orang miskin.

Kebijakan Harga Dalam Perpres No. 71 Tahun 2015

Nah, bagaimana pandangan prinsip-prinsip harga yang adil di atas terhadap ketentuan pada Perpres Nomor 71 Tahun 2015? Walaupun harga adil adalah berdasarkan prinsip-prinsip di atas, namun kebijakan harga dapat saja dilakukan oleh *wali al-amr* (pemimpin) dalam kondisi-kondisi tertentu yang memaksa. Oleh karena itu, penting digarisbawahi bahwa urgensi pengaturan harga dalam Perpres ini adalah jika terjadi gangguan kegiatan perdagangan nasional seperti gangguan pasokan atau harga berada di atas atau bawah harga acuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Namun demikian, kebijakan harga yang dilakukan hendaklah berdasarkan prinsip-prinsip harga yang adil. Pada hakikatnya, harga yang adil adalah harga yang berdasarkan pada mekanisme pasar selama tidak terdapat hal-hal yang merusak harga seperti terdapat eksploitasi dan seterusnya. Oleh karena itu, penetapan harga acuan pada Perpres No. 71 Tahun 2015 seyogyanya harus mengacu pada harga standar "mekanisme pasar". Perpres No. 71 Tahun 2015 seyogyanya menjelaskan dan mencerminkan harga referensi atau harga acuan sehingga para pedagang mau menjual sesuai dengan harga referensi yang ditetapkan.

Lebih dari itu, pemerintah seyogyanya lebih mengedepankan upaya untuk membasmi praktek-praktek yang membuat harga tidak berlangsung secara normal, salah satunya adalah sistem dagang kartel.

Karenanya, selama akar persoalan "mafia" ini tidak dituntaskan maka kebijakan harga tidak akan efektif menuntaskan persoalan kelangkaan produk dan harga yang melambung selama ini. Dalam lingkup yang lebih luas, hal yang lebih penting dilakukan pemerintah adalah mampu membangun lingkungan bisnis yang kondusif untuk terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat diantara pelaku usaha. Tanpa menuntaskan akar persoalan di atas, kebijakan harga yang dilakukan tidak hanya terkesan sebagai "pemadam kebakaran" tetapi juga tidak efektif dalam menuntaskan persoalan harga setiap kali hari-hari besar tiba seperti Ramadhan saat ini.